

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Andri Putra Kesmawan*

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [andriputrakesmawan@gmail.com](mailto:andriputrakesmawan@gmail.com), HP.085366038333*

Jaminan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi warga masyarakat. Oleh karena itu Negara dituntut untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang berasaskan keadilan. Agar hak setiap orang atas jaminan sosial dapat terwujud maka, undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa program jaminan sosial bersifat wajib yang memungkinkan mencakup seluruh rakyat (*universal coverage*) yang dicapai secara bertahap melalui Badan Hukum Publik yaitu BPJS Kesehatan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bantul dan faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui perbedaan pengaruh kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi (*mix method*). Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul. Unit penelitiannya dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, RSUD Penembahan Senopati Bantul dan Pasien RSUD Penembahan Senopati Bantul. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Badan BPJS Kesehatan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi digunakan analisis korelasi *Product Moment*. Selanjutnya, untuk menjelaskan pengaruh kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan menggunakan *Analysis of Varians* (ANOVA) dengan jenis analisis varians klasifikasi tunggal (*one way anova*).

Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini berdasarkan hasil perolehan nilai indeks dimensi komunikasi 4,44 (sangat baik), dimensi sumber daya 4,59 (sangat baik), dimensi disposisi 4,44 (sangat baik) dan dimensi struktur birokrasi 4,57 (sangat baik). Variabel yang mempengaruhi implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul adalah Konteks Kebijakan (X2) yakni sebesar 0.839 (sangat kuat). Sementara itu variabel Isi Kebijakan (X1) korelasinya signifikan terhadap variabel Implementasi (Y) lebih kecil yakni sebesar 0.768 (sangat kuat). Selanjutnya, ada perbedaan pengaruh Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan pada semua dimensi yakni dimensi kepesertaan dengan nilai  $F_h=100$ , dimensi pelayanan dengan nilai  $F_h=100$  dan dimensi finansial dengan nilai  $F_h=100$ .

***Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kebijakan kesehatan, BPJS Kesehatan***